

Konsep Kampung Tematik di Kelurahan Kota Bambu Utara Jakarta Barat dan Efektifitasnya terhadap Penataan Permukiman Kumuh

Marsa Tanzila Putri Nur Basri dan Ema Umilia

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

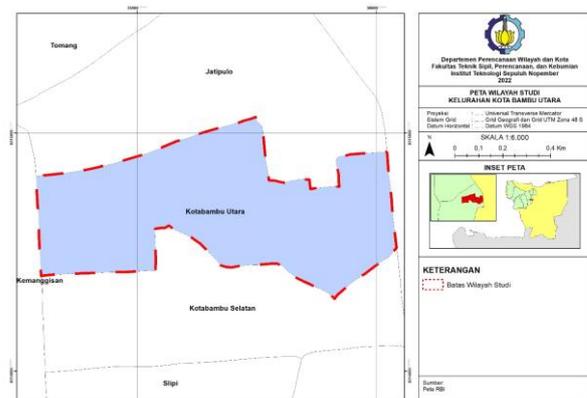
e-mail: ema_umilia@urplan.its.ac.id

Abstrak—DKI Jakarta merupakan pusat pertumbuhan yang sangat menarik bagi mereka yang tinggal disekitarnya. Masyarakat yang datang ke Jakarta untuk bekerja juga memanfaatkan fasilitas pelayanan yang ada. Hal ini mengakibatkan banyak permintaan untuk perumahan sedangkan lahan yang tersedia terbatas, menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. Sejumlah kampung tematik mulai dibangun sebagai bentuk dari program kampung terpadu di sejumlah kecamatan di DKI Jakarta. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 memiliki 8 kecamatan di Jakarta Barat yang menjadi tempat pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu. Salah satunya adalah Kampung Budaya pada Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana. Namun masih terdapat permasalahan di antaranya permasalahan sanitasi, kepadatan bangunan yang tinggi sehingga berpotensi tinggi rawan bencana kebakaran. Untuk itu diperlukan adanya penilaian efektivitas dari penerapan konsep kampung tematik terhadap upaya penataan permukiman kumuh. Untuk dapat menjawab tujuan penelitian, digunakan dua metode yaitu Content Analysis untuk mengidentifikasi kriteria kampung tematik terhadap upaya penataan permukiman kumuh dan Importance Performance Analysis untuk menilai efektivitas penerapan konsep kampung tematik di Kelurahan Kota Bambu Utara. Jenis penelitian kombinasi menggunakan strategi eksploratoris sekuensial. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan hasil bahwa penerapan konsep kampung tematik dapat dikatakan sudah cukup efektif dari segi penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dan pelibatan stakeholders. Adapun aspek yang tidak efektif di antaranya tingkat kepadatan bangunan, tingkat keteraturan bangunan, pemberdayaan masyarakat, aktivitas masyarakat, dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci—Permukiman kumuh, Kampung Tematik, Rfektivitas.

I. PENDAHULUAN

PERTUMBUHAN, penduduk membawa pengaruh besar terhadap kondisi internal sebuah perkotaan. Pertumbuhan populasi penduduk membuat kota semakin kekurangan lahan, hal ini mempengaruhi permukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah kawasan dengan kepadatan tinggi dengan fasilitas dan infrastruktur yang buruk dan merupakan manifestasi dari kemiskinan [1]. Permukiman kumuh muncul karena kepadatan penduduk yang tinggi dan kebutuhan pemukiman yang tinggi. Masyarakat memilih menggunakan



Gambar 1. Peta wilayah studi.

lahan-lahan lain karena keterbatasan lahan yang ada seperti pada tepian sungai, dekat dengan rel kereta, juga area-area yang tidak dimaksudkan untuk perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Gambar 1.

Penduduk DKI Jakarta memiliki kepadatan yang tinggi. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta Tahun 2021, DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk 10.609.681 jiwa dan kepadatan penduduk 15.978 jiwa/km². Jumlah penduduk di DKI Jakarta ini menentukan besarnya kebutuhan akan permukiman. Hal ini karena DKI Jakarta merupakan pusat pertumbuhan yang sangat menarik bagi mereka yang tinggal disekitarnya. Masyarakat yang datang ke Jakarta untuk bekerja juga memanfaatkan fasilitas pelayanan yang ada. Hal ini mengakibatkan banyak permintaan untuk perumahan dan reservasi untuk imigran. Berdasarkan publikasi BPS DKI Jakarta mengenai Evaluasi RW Kumuh DKI Jakarta, pada tahun 2015 terdapat 115 kelurahan dari total 261 kelurahan yang tergolong sebagai permukiman kumuh. Dengan total luasan permukiman kumuh sebesar 1.024,52 Ha. Kota Jakarta Barat menduduki peringkat kedua setelah Jakarta Utara yang memiliki luasan permukiman kumuh, yakni sebesar 288,95 Ha.

Pemerintah DKI Jakarta terus berusaha dalam menurunkan angka permukiman kumuh dan angka kemiskinan, menurut RTRW Jakarta 2030, disebutkan bahwa perbaikan lingkungan permukiman kumuh dilakukan dengan Program Kampung Terpadu. Sejumlah kampung tematik mulai dibangun sebagai bentuk dari program kampung terpadu di sejumlah kecamatan di DKI Jakarta. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 memiliki 8

Tabel 1.
Aspek dan variabel penelitian

No	Aspek	Variabel
1	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan Jaringan Jalan (X1)
		Ketersediaan Air Bersih (X2)
		Ketersediaan Sanitasi (X3)
		Ketersediaan Sistem Persampahan (X4)
		Ketersediaan Drainase (X5)
		Ketersediaan Jaringan Listrik (X6)
		Ketersediaan Jaringan Telepon (X7)
		Kualitas Jaringan Jalan (X8)
		Kualitas Air Bersih (X9)
		Kualitas Sanitasi (X10)
		Kualitas Sistem Persampahan (X11)
		Kualitas Drainase (X12)
		Kualitas Jaringan Listrik (X13)
		Kualitas Jaringan Telepon (X14)
		Proteksi Kebakaran (X15)
2	Fisik dan Lingkungan	Tingkat Kepadatan Bangunan (X16)
		Tingkat Keteraturan Bangunan (X17)
		Kualitas Kelayakan Bangunan (X18)
		Tingkat Penghijauan Bangunan (X19)
		Kebersihan Lingkungan (X20)
3	Ekonomi	Pemberdayaan Ekonomi (X21)
4	Sosial dan Budaya	Aktivitas Masyarakat (X22)
		Kesejahteraan Sosial (X23)
5	Partisipasi	Peran Masyarakat (X24)
		Pelibatan Stakeholders (X25)

kecamatan di Jakarta Barat yang menjadi tempat pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu. Salah satunya adalah Kampung Budaya pada Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah.

Kampung tematik adalah contoh yang baik dari inovasi sosial karena kampung tematik adalah kampung yang masyarakatnya telah memutuskan untuk mengembangkan wilayahnya berdasarkan ide dan tema yang dapat membuat desa tersebut dikenal dan lebih baik. Kampung tematik dikatakan berhasil jika melibatkan kelompok masyarakat untuk menerapkan tema yang sesuai dengan potensi kampung tersebut. Sedangkan kebalikannya, kampung tematik tidak berhasil jika masyarakat tidak ikut serta dalam menerapkan tema, sehingga temanya tidak berfungsi dan ditinggalkan [2]. Kampung tematik menjadi sasaran beberapa kawasan yang ditingkatkan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) perbaikan atau peningkatan kondisi kawasan kumuh, 2) peningkatan penghijauan kawasan secara intensif, 3) partisipasi aktif masyarakat, dan 4) peningkatan potensi sosial ekonomi masyarakat setempat [3]. Mengembangkan kampung tematik adalah sebuah solusi untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan juga membangkitkan inisiatif masyarakatnya. Pembangunan kampung tematik diharapkan bertujuan untuk memecahkan permasalahan terkait permukiman kumuh yang ada dengan menghadirkan nilai estetika hingga corak yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Masyarakat Kelurahan Kota Bambu Utara merasa terbantu

Tabel 2.
Perhitungan gap efektivitas penerapan konsep kampung tematik di Kelurahan Kota Bambu Utara

No	Variabel	Kondisi Saat Ini	Kepentingan	GAP	
1	Ketersediaan Jaringan Jalan (X1)	4,58	3,83	0,75	
	Ketersediaan Air Bersih (X2)	4,60	3,93	0,67	
	Ketersediaan Sanitasi (X3)	4,57	4,16	0,41	
	Ketersediaan Sistem Persampahan (X4)	4,59	4,13	0,46	
	Ketersediaan Drainase (X5)	4,58	4,02	0,56	
	Ketersediaan Jaringan Listrik (X6)	4,42	4,03	0,39	
	Ketersediaan Jaringan Telepon (X7)	4,46	3,98	0,48	
	Kualitas Jaringan Jalan (X8)	3,64	4	0,24	
	Kualitas Air Bersih (X9)	4,65	4,14	0,51	
	Kualitas Sanitasi (X10)	3,58	4	-0,42	
	Kualitas Sistem Persampahan (X11)	3,52	3,44	0,08	
	Kualitas Drainase (X12)	4,54	4,15	0,39	
	Proteksi Kebakaran (X13)	3,65	4	0,65	
	2	Tingkat Kepadatan Bangunan (X14)	1,28	3,98	-2,70
		Tingkat Keteraturan Bangunan (X15)	1,22	3,99	-2,77
Kualitas Kelayakan Bangunan (X16)		2,78	3,38	-0,60	
Tingkat Penghijauan Bangunan (X17)		4,59	3,85	0,74	
Kebersihan Lingkungan (X18)		4,56	3,75	0,81	
3	Pemberdayaan Masyarakat (X19)	1,24	3,85	-2,61	
	Aktivitas Masyarakat (X20)	2,52	3,5	-0,98	
4	Kesejahteraan Sosial (X21)	1,26	3,94	-2,68	
	Peran Masyarakat (X22)	4,54	4,37	0,17	
	Pelibatan Stakeholders (X23)	3,88	4,35	-0,47	

dengan adanya penerapan konsep kampung tematik yakni Kampung Budaya dikarenakan adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas. Beberapa di antaranya adalah pembenahan jalan, perbaikan saluran air, pembangunan sumur resapan, dan pembangunan fasilitas jalan untuk disabilitas. Penghijauan juga turut dilakukan dengan adanya taman vertikal. Adapun selain itu, nilai estetika bertambah dikarenakan adanya lukisan mural di sepanjang permukiman. Namun, masih terdapat permasalahan pada kondisi eksisting beberapa di antaranya dalam aspek sanitasi, pembuangan limbah yang sembarangan dikarenakan banyak rumah belum layak sanitasi. Tidak hanya itu, dikarenakan jumlah penduduk pada wilayah studi tertinggi di antara seluruh RW di Kelurahan Kota Bambu Utara dengan rumah padat sehingga menjadi daerah yang rawan kebakaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas dari penerapan konsep kampung tematik di Kelurahan Kota Bambu Utara terhadap upaya penataan permukiman kumuh.



Gambar 2. Kondisi eksisting kampung tematik kampung budaya.



Gambar 3. Kegiatan pencak silat di kampung tematik kampung budaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh memiliki berbagai macam pengertian dari sudut pandang yang berbeda. Kawasan yang tidak terstruktur dan tidak terpola tata letak rumah, jalan tidak teratur, fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih serta toilet yang tidak dapat digunakan merupakan pengertian dari permukiman kumuh. Tak hanya itu, bentuk fisik yang tidak memadai juga dalam periode berkepanjangan mengalami banjir setiap tahun [4]. Di sisi lain, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh tidak layak huni karena kepadatan bangunan yang tinggi, ketidakteraturan bangunan, dan buruknya kualitas bangunan dan infrastruktur tidak memenuhi standar minimal. Dua perspektifnya di atas menyoroti aspek fisik dan infrastruktur dari klasifikasi terkait kerusakan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu kawasan ditetapkan atau digolongkan sebagai permukiman kumuh ketika kondisi fisik persil tidak layak huni karena kualitas yang buruk dan infrastruktur yang tidak memadai.

Di sisi lain, menurut beberapa ahli lainnya, mereka memiliki perspektif yang berbeda tentang topik tersebut. Mereka mendefinisikan permukiman kumuh yang termasuk perumahan bagi masyarakat miskin yang tinggal di provinsi. Ini terletak di ujung jalan dan gang, dalam kondisi buruk, merupakan bagian dari keseluruhan kota dan biasa disebut daerah perbatasan [5]. Permukiman kumuh juga dipandang sebagai tempat masyarakat miskin membentuk hunian dalam kondisi yang buruk [6]. Dari kedua perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh tidak hanya miskin secara spasial dan infrastruktur, tetapi masyarakat yang tinggal di sana juga tergolong miskin dalam segi ekonominya.

B. Kriteria Kampung Tematik

Kampung tematik merupakan bentuk kreasi desa dengan kekhasan berbasis kearifan lokal. Konsep kampung tematik memberi kesempatan kepada kotamadya untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan rencana tata ruang untuk kampung berkelanjutan yang mereka bentuk [7]. Di sisi lain, menurut Kroczo-Gaźewska konsep tema kampung juga merupakan ide kreatif yang lahir dari komunitas dan masyarakat yang dikenal dengan inovasi sosial [2]. Karena dengan demikian, masyarakat mengembangkan ide dan gagasan baru untuk menciptakan kampung yang kreatif dan berkelanjutan. Sasaran yang diperhatikan dalam kampung tematik dalam berbagai bidang, di antaranya:

1. Perbaikan atau peningkatan kondisi kawasan kumuh menjadi lebih baik.
2. Peningkatan penghijauan kawasan secara intensif.
3. Partisipasi aktif masyarakat.
4. Peningkatan potensi sosial ekonomi masyarakat setempat.

C. Penataan Kawasan Permukiman Terpadu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Kecamatan Palmerah yang terletak di Jakarta Barat sebagai salah satu lokasi pelaksanaan peningkatan kualitas dalam pembangunan kawasan terpadu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Nomor. 90 Tahun 2018. Peningkatan kualitas ini diatur untuk memenuhi persyaratan akomodasi yang wajar dan aman. Perumahan bagi masyarakat perkampungan, pemenuhan asas penghidupan yang menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki dan menyewa rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan pelayanan dan prasarana umum, serta terwujudnya aksesibilitas terhadap fasilitas umum.

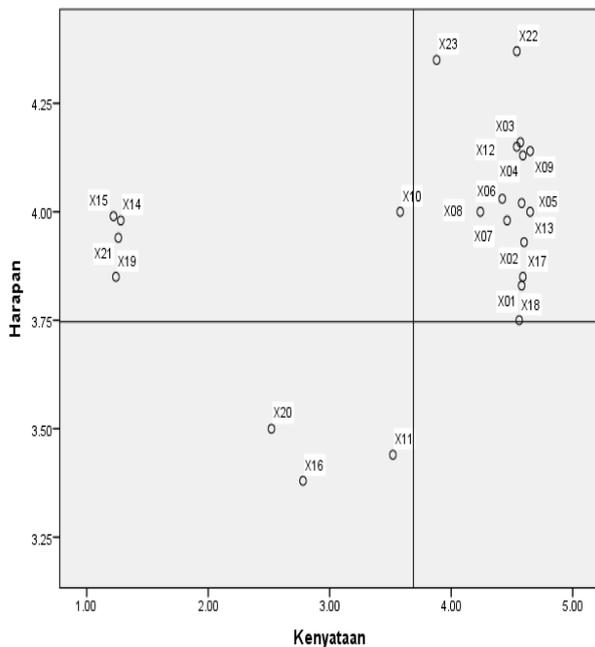
Sebagaimana tertuang dalam RTRW DKI Jakarta, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan permukiman harus ditingkatkan dengan memperbaiki lingkungan di kawasan kumuh dengan program perbaikan kampung terpadu. Kembali pada kebijakan Pergub, disebutkan pula bahwa sebagai bagian dari kegiatan peningkatan mutu pelayanan digunakan pendekatan penempatan kawasan khusus secara terpadu dengan aspek penempatan lingkungan fisik, pemberdayaan sosial dan budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagai perwujudan program pemanfaatan kawasan terpadu, Kecamatan Palmerah di Jakarta Barat telah membuat kampung tematik di beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Palmerah, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan Jatipulo. Berdasarkan Pergub yang berlaku saat ini, keempat kelurahan tersebut menjadi tempat peningkatan kualitas permukiman karena kawasannya yang kumuh. Kawasan Palmerah merupakan salah satu kawasan perkantoran di Jakarta Barat yang daerah permukimannya tergolong kumuh. Kampung budaya telah dibuat di desa Kota Bambu Utara sebagai bagian dari penataan kawasan kumuh dalam surat keputusan gubernur mengenai penataan Kawasan terpadu.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini



Gambar 4. Kuadran penilaian efektivitas penerapan konsep kampung tematik di Kelurahan Kota Bambu Utara.

adalah pendekatan rasionalistik dengan jenis penelitian kombinasi menggunakan strategi eksploratoris sekuensial.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini didapatkan dari hasil *content analysis* dengan *stakeholders'* yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi terhadap pembangunan kampung tematik di wilayah studi. Didapatkan 5 (lima) aspek dan 25 (dua puluh lima) variabel berdasarkan hasil *content analysis* yang dapat dilihat pada Tabel 1.

C. Sampel Penelitian

Dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena metode pengambilan sampel berbasis subjek dan tidak berdasarkan hierarki, peluang, atau geografi, tetapi mengungkapkan tujuan tertentu [8]. Sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus slovin, maka sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Adapun kriteria responden merupakan penduduk RW 07 Kelurahan Kota Bambu Utara yang ikut terlibat atau merasakan dampak dari pembangunan kampung tematik di Kelurahan Kota Bambu Utara dan sudah berusia minimal 17 tahun.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner terhadap masyarakat sedangkan pengumpulan data sekunder menggunakan studi literatur pada buku atau jurnal juga termasuk dokumen yang terkait dengan penelitian.

E. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *Importance Performance Analysis* untuk mengetahui nilai efektivitas pada masing-masing variabel. Juga mengetahui variabel mana yang termasuk ke dalam Kuadran I atau prioritas utama.

Tabel 4. Hasil analisis efektivitas kriteria kampung tematik terhadap upaya penataan permukiman kumuh

Variabel	Sub-variabel	GAP	Kategori
Sarana dan Prasarana	Ketersediaan Jaringan Jalan (X01)	0,75	Efektif
	Ketersediaan Air Bersih (X02)	0,67	Efektif
	Ketersediaan Sanitasi (X03)	0,41	Cukup Efektif
	Ketersediaan Sistem Persampahan (X04)	0,46	Cukup Efektif
	Ketersediaan Drainase (X05)	0,56	Cukup Efektif
	Ketersediaan Jaringan Listrik (X06)	0,39	Cukup Efektif
	Ketersediaan Jaringan Telepon (X07)	0,48	Cukup Efektif
	Kualitas Jaringan Jalan (X08)	0,24	Cukup Efektif
	Kualitas Air Bersih (X09)	0,51	Cukup Efektif
	Kualitas Sanitasi (X10)	-	Cukup Efektif
	Kualitas Sistem Persampahan (X11)	0,08	Cukup Efektif
	Kualitas Drainase (X12)	0,39	Cukup Efektif
Fisik dan Lingkungan	Proteksi Kebakaran (X13)	0,65	Efektif
	Tingkat Kepadatan Bangunan (X14)	-	Tidak Efektif
	Tingkat Keteraturan Bangunan (X15)	2,70	Tidak Efektif
	Kualitas Kelayakan Bangunan (X16)	-	Cukup Efektif
	Tingkat Penghijauan Bangunan (X17)	0,60	Efektif
Ekonomi	Kebersihan Lingkungan (X18)	0,74	Efektif
	Pemberdayaan Masyarakat (X19)	0,81	Efektif
	Aktivitas Masyarakat (X20)	-	Tidak Efektif
	Kesejahteraan Sosial (X21)	2,68	Efektif
Partisipasi	Peran Masyarakat (X22)	0,17	Cukup Efektif
	Pelibatan <i>Stakeholders</i> (X23)	-	Cukup Efektif

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting Kampung Tematik Kampung Budaya di Kelurahan Kota Bambu Utara

Sarana dan prasarana atau yang disebut dengan infrastruktur merupakan hal penting dalam sebuah kawasan atau daerah. Infrastruktur dapat mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembangunan Kampung Budaya terjadi peningkatan layanan sarana dan prasarana permukiman, sesuai dengan tujuan diadakannya *community action plan* dapat dilihat pada Gambar 2. Kondisi eksisting fisik bangunan dilihat dari tingkat kepadatan bangunan yakni sangat tinggi, hal ini dikarenakan tingkat kepadatan penduduknya tinggi sedangkan lahan bermukim yang

terbatas. Tingkat keteraturan bangunan sangat buruk dikarenakan dimensi, bentuk, dan ketinggiannya yang berbeda-beda. Beberapa rumah juga termasuk ke dalam rumah tidak layak huni dikarenakan satu rumah dihuni oleh 2-5 KK, sehingga tidak memenuhi standar minimal kebutuhan ruang per orang. Dikarenakan kepadatan penduduk yang tinggi dan lahan yang terbatas, upaya penghijauan di Kampung Budaya dilakukan dengan dibentuknya vertical garden. Vertical garden tersebar di dua titik, yaitu pada RT 11 dan RT 3 dengan total sepanjang kurang lebih 100 meter.

Kondisi perekonomian di Kampung Budaya Kelurahan Kota Bambu Utara tidak terlihat perubahan yang signifikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang, ojek online, dan wiraswasta. Tidak ada bentuk kerja sama ekonomi yang terjadi setelah pembangunan kampung tematik. Bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan hanya sebatas pembinaan kewirausahaan terpadu yang dilakukan pada awal berdirinya kampung tematik. Setelah dibangunnya kampung tematik di RW 07, hal ini mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat. Dengan disediakannya fasilitas berupa bangku yang terletak di sepanjang jalan yang terdapat vertical garden, membuat masyarakat cenderung berkumpul dan menghabiskan waktunya di sore hari bersama. Kampung tematik yang mengusung tema kebudayaan ini juga melaksanakan bentuk pelestarian budaya Betawi yaitu sanggar dan pencak silat (lihat Gambar 3). Hal ini menjadikan masyarakat setempat bersama-sama melestarikan budaya Betawi, salah satunya adalah ikut memeriahkan event ulang tahun Jakarta bersama. Bentuk partisipasi antara masyarakat dan stakeholders hanya terjadi di masa pembangunan awal kampung tematik. Pada awal pembangunan, *stakeholders* yang terlibat adalah pemerintah khususnya Sudin Perumahan dan Permukiman, lalu ada Bina Marga, dan juga Sudin Pertamanan dan Hutan Kota. Adapun kelompok swasta berupa LSM PPAP dan mahasiswa. Untuk sekarang perawatan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat setempat.

B. Analisis Penilaian Efektivitas Penerapan Konsep Kampung Tematik terhadap Upaya Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Bambu Utara

Setelah mendapatkan 25 variabel sebagai kriteria kampung tematik terhadap upaya penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kota Bambu Utara berdasarkan hasil content analysis, selanjutnya adalah melakukan analisis penilaian efektivitas penerapan konsep kampung tematik di Kelurahan Kota Bambu Utara. Penilaian efektivitas ini dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kota Bambu Utara lebih khususnya masyarakat RW 07 yang merupakan wilayah dibangunnya kampung tematik yakni Kampung Budaya. Sebelum melakukan kuesioner terhadap 100 responden, terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner yang akan digunakan. Jumlah sampel yang akan diambil adalah sebesar 35 responden. Berdasarkan uji reliabilitas pada setiap variable, hasil yang didapatkan adalah bahwa seluruh instrument kuesioner memiliki nilai Cronbach's Alpha di aras 0.8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument kuesioner pada penelitian ini reliabel. Namun pada uji validitas, terdapat 2 variabel yang tidak valid yakni kualitas jaringan listrik dan

kualitas jaringan telepon sehingga variabel tersebut tidak digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Perhitungan dengan melihat gap atau selisih dari kondisi saat ini dengan kepentingan, perhitungan ini dilakukan untuk penilaian efektivitas penerapan konsep kampung tematik terhadap penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah Jakarta Barat menurut persepsi dari masyarakat pada wilayah studi. Pada analisis ini diambil rata-rata dari 100 responden masyarakat yang telah mengisi kuesioner kondisi saat ini dan kepentingan dari dibangunnya kampung tematik di wilayah studi. Berikut adalah hasil selisih dari nilai kenyataan dan harapan terkait efektivitas penerapan konsep kampung tematik di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat. Hasil penilaian gap dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan perhitungan gap yang sudah dilakukan dengan mengukur selisih antara kondisi saat ini dan kepentingan didapatkan bahwa nilai gap bernilai positif dan negatif. Penilaian efektivitas penerapan konsep kampung tematik ini dikategorikan menjadi 3 penilaian yaitu sudah efektif, cukup efektif, dan tidak efektif. Tabel *range score gap* dapat dilihat pada Tabel 3. Interpretasi dari tabel range score gap adalah variabel dikatakan sudah efektif, cukup efektif, dan tidak efektif apabila:

1. Sudah efektif: range score gap $> 0,56$
2. Cukup efektif: range score gap $-0,60$ sampai $0,56$
3. Tidak efektif: range score gap $< - 0,60$

Dari kategori rentang nilai efektivitas yang sudah ditentukan di atas, selanjutnya akan dilakukan perhitungan skoring atau gap nilai efektivitas kriteria kampung tematik terhadap upaya penataan permukiman kumuh. Berikut merupakan penjelasan penilaian efektivitas setiap kriteria di wilayah studi.

Hasil yang didapatkan dari penilaian gap pada Tabel 4 didapatkan bahwa variabel sarana dan prasarana, variabel fisik dan lingkungan dan partisipasi cukup efektif dikarenakan hasil rata-rata gap berada di antara nilai $-0,60$ sampai dengan $0,56$. Pada variabel sarana dan prasarana bernilai $0,40$ dan variabel partisipasi bernilai $-0,15$. Sedangkan variabel fisik dan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dinilai tidak efektif karena rata-rata gap berada pada nilai melebihi $-0,60$ yakni pada variabel fisik dan lingkungan bernilai $-0,90$, variabel ekonomi bernilai $-2,61$ dan pada variabel sosial budaya bernilai $-1,83$.

Pada variabel sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana berupa jaringan jalan, air bersih, dan proteksi kebakaran mendapatkan nilai yang efektif. Hal ini sesuai dengan apa yang dilihat dari kondisi eksisting Kampung Tematik Budaya RW 07 Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat. Jaringan jalan pada Kampung Budaya tergolong sangat baik, dilihat dari ketersediaannya yang menyeluruh ke seluruh wilayah studi dengan kondisi perkerasan kaku atau beton semen sehingga memiliki ketahanan yang lebih lama. Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, seluruh masyarakat sudah menggunakan PDAM. Sistem proteksi kebakaran di Kampung Budaya juga sudah terpenuhi dengan tersebarnya hydrant kering di beberapa titik. Menurut dokumen monografi Kelurahan Kota Bambu Utara, RW 07 merupakan lokasi dengan potensi bencana kebakaran tertinggi dikarenakan kepadatan bangunan yang tinggi. Sehingga dengan adanya ketersediaan hydrant kering

dapat membantu dalam meningkatkan langkah antisipasi bencana kebakaran di Kampung Budaya.

Pada variabel fisik dan lingkungan secara rata-rata mendapat nilai tidak efektif karena kondisi fisik bangunan dilihat dari kepadatan dan keteraturannya masih sangat padat dan buruk sehingga hasil nilainya tidak efektif. Meskipun begitu, pada sub-variabel penghijauan dan kebersihan keduanya mendapat nilai efektif. Apabila dilihat dari kondisi eksisting, penghijauan yang dilakukan di Kampung Budaya berupa pembangunan vertical garden. Hal ini dilakukan karena keterbatasan lahan di Kampung Budaya. Menurut hasil wawancara bersama Ketua RW 07, Pak Jenta juga menyebutkan bahwa hingga sampai saat ini dirinya dan masyarakat masih menjaga dan merawat vertical garden yang dibangun pada tahun 2019 lalu sehingga kondisinya masih terjaga hingga sekarang. Kondisi kebersihan lingkungan juga mendapatkan nilai efektif karena menurut hasil wawancara dengan Lurah dan Ketua RW 07 sistem persampahan sudah baik dan ditambah dengan kesadaran dan inisiatif masyarakat juga meningkat dengan adanya pembinaan agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil content analysis dengan kode T3.5 dan T4.11

Sedangkan pada variabel ekonomi dan sosial budaya keduanya mendapatkan nilai tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara, pemberdayaan masyarakat hanya sebatas pembinaan wirausaha untuk mengembangkan usaha sendiri, namun tidak ada kelanjutan dari masyarakat karena kurang kreatif dan inovatif. Untuk aktivitas masyarakat sendiri berfokus pada pelestarian budaya Betawi melalui kesenian tari dan silat. Sedangkan masyarakat berharap ada aktivitas yang berfokus dalam meningkatkan perekonomian mereka. Pada sub-variabel kesejahteraan sosial, menurut hasil wawancara pemerintah sudah memfasilitasi dengan adanya pembinaan sosial ke masyarakat. Hanya saja berdasarkan pandangan masyarakat, hal tersebut masih dinilai kurang karena lingkungannya tidak menyeluruh ke seluruh masyarakat.

Pada variabel partisipasi berupa peran masyarakat dan pelibatan stakeholders mendapatkan nilai cukup efektif. Peran masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan dan perawatan kampung tematik contohnya dalam pembuatan mural, pembangunan vertical garden, pendirian sanggar dan padepokan, dan perawatan sarana dan prasarana yang tersedia. Pelibatan stakeholders, berdasarkan hasil wawancara yang terlibat selain masyarakat adalah sudin perumahan permukiman, sudin pertamanan, bina marga, LSM PPAP, dan mahasiswa yang melakukan KKN. Dalam hal ini pelibatan stakeholders dalam pembangunan kampung tematik pada pendanaan dan membantu penyediaan alat dan pembinaan.

Apabila dilihat berdasarkan hasil analisis kuadran dengan menggunakan SPSS, dimana menunjukkan masing-masing sub-variabel ke dalam urutan prioritas berdasarkan pembagian empat kuadran dapat dilihat pada Gambar 4.

Berdasarkan hasil analisis SPSS pada diagram kuadran di atas dapat di lihat bahwa pada kuadran I (prioritas utama) terdiri atas variabel kualitas sanitasi (X10), kepadatan bangunan (X14), keteraturan bangunan (X15), pemberdayaan masyarakat (X19), dan kesejahteraan sosial (X21). Sedangkan hampir seluruh variabel berada pada kuadran II (pertahankan prestasi) yang terdiri atas ketersediaan jaringan jalan (X01), ketersediaan air bersih (X02), ketersediaan

sanitasi (X03), ketersediaan sistem persampahan (X04), ketersediaan drainase (X05), ketersediaan jaringan listrik (X06), ketersediaan jaringan telepon (X07), kualitas jaringan jalan (X08), kualitas air bersih (X09), kualitas drainase (X12), proteksi kebakaran (X13), tingkat penghijauan bangunan (X17), kebersihan lingkungan (X18), peran masyarakat (X22) dan pelibatan stakeholders (X23). Pada kuadran III (prioritas rendah) terdapat variabel kualitas sistem persampahan (X11), kualitas kelayakan bangunan (X16), dan aktivitas sosial (X20).

C. Rekomendasi pada Kuadran I (Prioritas Utama)

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan konsep kampung tematik terhadap upaya penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat terdapat pada kuadran I. Dikarenakan pada kuadran I memiliki definisi kepentingan/harapan yang tinggi namun kinerja/kondisi eksisting rendah. Sehingga pada kuadran ini perlu adanya peningkatan dan merupakan prioritas yang utama.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk menangani permasalahan kepadatan bangunan dan ketidakteraturan bangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hunian Vertikal

Pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan khususnya di daerah perkotaan dimana ketersediaan lahan untuk bermukim sangat minim. Pemetaan kondisi eksisting di lokasi yang direncanakan menjadi langkah awal untuk bisa melihat ketersediaan lahan dan aktivitas di sekitarnya. Tinggi bangunan hunian vertikal disesuaikan dengan karakteristik fisik wilayah dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Penyediaan jalur sirkulasi dengan membedakan jalur kendaraan dengan pedestrian sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Jalur kendaraan yang direncanakan dibedakan menjadi jalur masuk dan keluar. Kebutuhan terkait ruang terbuka hijau juga perlu diperhatikan dalam pembangunannya untuk memenuhi Koefisien Dasar Hijau (KDH) [9].

2) Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Bangunan yang sudah mendapatkan izin bisa saja sewaktu-waktu mengalami perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung. Perubahan tersebut perlu dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung baru melewati penerbitan IMB baru atau revisi IMB. Beberapa parameter yang digunakan dalam IMB terdiri dari KDB, KLB, dan ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bangunan yang menempati bangunan tersebut. Akan tetapi beberapa masyarakat khususnya daerah perkotaan menggunakan jasa perantara dalam proses perizinan maka ketika adanya pelanggaran yang ditemukan, tentu akan adanya kesulitan komunikasi dalam menghubungi jasa perantara yang terlibat. Bahkan tidak jarang karena kurangnya dukungan jasa perantara dalam menyelesaikan proses revisi IMB maka hal tersebut menjadi masalah [10].

3) Penataan Tata Bangunan

Ketidakteraturan bangunan karena tidak sesuai dengan RDTR ataupun RTBL menjadi permasalahan yang harus diatasi. Penataan bangunan dari segala aspek pun perlu dilakukan. Beberapa hal yang perlu menjadi fokus penataan

tata bangunan adalah sebagai berikut [11];

- a. Menata muka bangunan, yaitu membentuk ruang jalur pejalan yang nyaman dan menarik. Pedestrian menjadi hal penting karena selain memberikan keamanan hal tersebut juga menambah nilai estetika.
- b. Penyelesaian masalah kebakaran dilakukan dengan merekonstruksi pola, lebar dan arus jalan. Sehingga memberikan keleluasaan mobil damkar masuk ke permukiman penduduk
- c. Membatasi pembangunan dengan menetapkan garis sempadan bangunan (GSB), yang sesuai dengan arahan.

Sedangkan rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat

1) Menggerakan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Setempat

Suatu wilayah disebut kampung tematik jika pengembangan kampung mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yakni adanya inisiatif masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi ekonomi [12]. Adapun kelompok atau organisasi sosial yang dapat memberdayakan masyarakat di wilayah studi di antaranya adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat PKK ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat.

2) Pemanfaatan Sumberdaya Endogen

Suatu wilayah disebut kampung tematik jika dapat memanfaatkan potensi wilayah untuk mendorong perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. [12]. Di Kelurahan Kota Bambu Utara sendiri dapat memanfaatkan sistem persampahan yang sudah sangat baik dengan membuat bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering yang kemudian dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan. Sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya dapat dijual di pabrik atau mitra yang bekerja sama. Dalam hal ini, PKK dan Karang Taruna dapat berkolaborasi untuk membantu menjalankan bank sampah agar dapat terus berlanjut, sehingga tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan tetapi sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari proses analisis yang telah dilakukan mengenai penilaian efektivitas penerapan konsep kampung tematik terhadap penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah Jakarta Barat berdasarkan instrument yang sudah ditentukan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil penilaian efektivitas menggunakan perhitungan skoring atau gap nilai efektivitas dengan kategori rentang nilai yang ditentukan dengan SPSS, maka didapatkan hasil: a) Pada variabel sarana dan prasarana secara rata-rata sudah mendapatkan nilai yang cukup efektif. Dengan nilai sub-

variabel ketersediaan jaringan jalan sebesar 0,75, ketersediaan air bersih sebesar 0,67, dan proteksi kebakaran sebesar 0,65 yang masuk dalam kategori efektif; b) Pada variabel fisik dan lingkungan secara rata-rata mendapatkan nilai yang tidak efektif. Dengan nilai sub-variabel tingkat kepadatan bangunan sebesar -2,70 dan tingkat keteraturan bangunan sebesar -2,77 yang masuk ke dalam kategori tidak efektif. Sedangkan pada sub-variabel tingkat penghijauan sebesar 0,74 dan kebersihan lingkungan sebesar 0,81; c) Pada variabel ekonomi sub-variabel pemberdayaan masyarakat mendapatkan nilai -2,61 dan termasuk ke dalam kategori tidak efektif; d) Pada variabel sosial budaya termasuk ke dalam kategori tidak efektif. Dengan nilai sub-variabel aktivitas masyarakat sebesar -0,98 dan kesejahteraan sosial sebesar -2,68; e) Pada variabel partisipasi termasuk ke dalam kategori cukup efektif. Dengan nilai sub-variabel peran masyarakat sebesar 0,17 dan pelibatan stakeholders sebesar -0,47; (2) Berdasarkan hasil analisis kuadran dengan menggunakan SPSS, dimana menunjukkan masing-masing sub-variabel ke dalam urutan prioritas berdasarkan pembagian empat kuadran adalah sebagai berikut: a) Pada kuadran I (prioritas utama): kualitas sanitasi, kepadatan bangunan, keteraturan bangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial; b) Pada kuadran II (pertahankan prestasi): ketersediaan jaringan jalan, ketersediaan air bersih, ketersediaan sanitasi, ketersediaan sistem persampahan, ketersediaan drainase, ketersediaan jaringan listrik, ketersediaan jaringan telepon, kualitas jaringan jalan, kualitas air bersih, kualitas drainase, proteksi kebakaran, tingkat penghijauan bangunan, kebersihan lingkungan, peran masyarakat, dan pelibatan stakeholders; c) Pada kuadran III (prioritas rendah): sistem persampahan, kualitas kelayakan bangunan, dan aktivitas sosial; d) Pada kuadran IV (terlalu berlebihan).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan beberapa saran terhadap penelitian penilaian efektivitas penerapan konsep kampung tematik terhadap penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah Jakarta Barat sebagai berikut: (1) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam meningkatkan efektivitas kampung-kampung tematik lainnya yang tersebar di Jakarta Barat sebagai upaya penataan permukiman kumuh; (2) Penelitian ini hanya bertujuan untuk melakukan penilaian efektivitas penerapan kampung tematik terhadap upaya penataan permukiman kumuh. Selanjutnya diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan efektivitas penerapan kampung tematik terhadap upaya penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Kuswartojo, D. Rosnarti, W. Effendi, R. Eko K., and P. Sidi, *Perumahan dan Permukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan*. Bandung: ITB Press, 2005.
- [2] A. Kloczko-Gajewska, "Can we treat thematic villages as social innovations," *Journal of Central European Green Innovation*, vol. 2, no. 3, pp. 49–59, 2014, doi: 10.22004/ag.econ.188135.
- [3] B. T. Ujianto, H. Z. Zahro, and B. Maringka, "Kegiatan perancangan kampung belimbing rw.08-09, Kel. Blimbing, Kec.

- [4] Blimbing, Kota Malang,” *Jurnal Arsitektur*, vol. 2, no. 2, Nov. 2018, doi: <https://doi.org/10.36040/pawon.v2i02.254>.
- [4] D. P. Santosa, “Penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” *Jurnal Universitas Pasundan*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2007.
- [5] S. Muhajir, “Identifikasi kawasan kumuh dan strategi penanganannya pada permukiman di Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene,” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.
- [6] H. R. Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- [7] W. Idziak, J. Majewski, and P. Zmysłony, “Community participation in sustainable rural tourism experience creation: a long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland,” *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 23, no. 8–9, pp. 1341–1362, Oct. 2015, doi: 10.1080/09669582.2015.1019513.
- [8] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- [9] A. E. Abdelsalam, D. Nicholson-Cole, and K. Dewidar, “Sustainable vertical urbanism as a design approach to change the future of hyper density cities: redesigning the skyscraper from the urban design perspective,” *Journal of Advance Research in Mechanical & Civil Engineering (ISSN 2208-2379)*, vol. 5, p. 9, Jul. 2018, doi: 10.53555/nmce.v5i7.300.
- [10] A. N. Putri, M. Yusuf, and R. Handayani, “Pengawasan izin mendirikan bangunan (imb) bangunan gedung di Kota Tangerang Selatan,” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2018. [Online]. Available: <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1050>
- [11] S. Beddu and M. Yahya, “Penataan permukiman kumuh perkotaan berbasis penataan bangunan dan lingkungan studi kasus: Kelurahan Gusung, Kec. Ujung Tanah Kota Makassar,” *Jurnal Planologi*, pp. 1–9, 2015.
- [12] R. Ng. B. P. Aji, “Konsep perancangan kampung tematik menggunakan pendekatan elemen citra kota berdasarkan teori kevin lynch: studi kasus Kelurahan Klegen Kota Madiun,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2021.